
**PEMERINTAH SEBAGAI SEBUAH SISTEM DALAM KAJIAN EKOLOGI
(GOVERNMENT AS A SYSTEM IN ECOLOGICAL STUDIES)****Oleh****Naufal Dholifun Nafsi¹⁾, Nur Azizah²⁾, Nurul Fajriyanti³⁾ & Herabudin⁴⁾****^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung****Email: ¹naufaldn765@gmail.com, ²nurazizah908@gmail.com,****³nurulfajriyanti75@gmail.com & ⁴herabudin@yahoo.co.id****Abstrak**

Dalam kajian ekologi, pemerintah sebagai sebuah sistem berarti mempelajari hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan sebagai “makhluk hidup” dengan lingkungannya. Artinya sistem pemerintahan memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek lingkungan (seperti : Masyarakat, tumbuhan, bangunan dsb). Maka dari itu penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan komponen sistem apa saja yang ada di pemerintahan yang dapat mempengaruhi lingkungannya. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber kajiannya. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan pendekatan sistem dalam pemerintahan dan komponen-komponen sistem pemerintahan.

Kata Kunci: Pemerintah, Sistem & Ekologi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Menurut [Wasistiono](#) (2013) Ekologi pemerintahan sebagai perpaduan antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan telah meminjam konsep sentral ekosistem, dalam arti mempelajari ekologi pemerintahan dengan melihat pemerintah sebagai sebuah sistem, Yakni mempelajari hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan sebagai “makhluk hidup” dengan lingkungannya. Seperti menurut Riggs dalam (Engkus, 2017), ekologi digambarkan sebagai interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya.

Pemerintah sebagai sebuah sistem harus memiliki suatu sistem keseimbangan yang dinamis, agar sistemnya dapat menjaga eksistensinya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap seimbang dan dinamis, perlu dibuat mekanisme umpan balik dan umpan kedepan yang terbuka dan objektif.

Sebuah sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar, yang terbentuk dari berbagai sub-sistem. Antara sistem yang satu dengan sistem yang lain saling mendukung sehingga membantu dalam pemecahan masalah dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Jadi,

sebuah sistem diciptakan untuk memelihara dan melindungi kepentingan masyarakat luas (Hasibuan, 2019). Oleh karena itu, Meadows (2009) mengemukakan bahwa sistem bukan hanya sekedar jumlah dari bagian-bagian, tetapi lebih dari itu. Sebab berkumpulnya bagian-bagian menjadi satu kesatuan, membangun sebuah sinergi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

LANDASAN TEORI**Pengertian Sistem**

Sistem menurut Harijono (1984: 78), sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.

Menurut Jerry FutzGerald (1981 : 5) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu

Menurut Lani (1995: 9), sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling

berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama

Meadows (2009) mengemukakan bahwa sistem bukan hanya sekedar jumlah dari bagian-bagian, tetapi lebih dari itu. Sebab berkumpulnya bagian-bagian menjadi satu kesatuan, membangun sebuah sinergi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan komponen yang saling berhubungan sehingga membuat suatu kesatuan dan bisa mempengaruhi antara komponennya. Dari kesatuan ini kemudian memunculkan sinergi yang bermanfaat bagi lingkungannya dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem Secara Hierarki

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang hierarki suatu sistem diantaranya Sutherland dalam [Wasistiono](#) (2013) mengemukakan bahwa ada empat tipe struktur hierarki sistem yakni sebagai berikut. Tipe pertama, yakni tipe dominasi struktural yang ditandai dengan adanya dominasi dari komponen sistem yang lebih tinggi kepada komponen sistem yang lebih rendah. Komponen sistem tertinggi berfokus pada kewenangan tertinggi. Dalam sistem pemerintahan, tipe ini dapat ditemukan pada organisasi negara dan organisasi militer. Tipe kedua, sebuah sistem dengan komponen-komponen yang tidak dapat diasumsikan secara penuh dihambat oleh unit-unit yang lebih tinggi, atau beberapa hierarkis pada berbagai aras tidak terhubung oleh rantai komando atau komunikasi. Dalam sistem pemerintahan, tipe ini dapat dilihat pada organisasi-organisasi persemakmuran seperti asosiasi beberapa negara ASEAN. Tipe ketiga, yang disebut *neogenetic hierarchy*, yaitu suatu komponen pada tingkatan tinggi dikembangkan dari komponen-komponen yang lebih rendah tingkatannya. Dalam sistem pemerintahan, tipe ini dapat dilihat pada negara-negara berbentuk federasi. Tipe keempat yang disebut dengan *the identity hierarchy*, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat khusus, yakni pergantian sebuah hierarki pada tingkat tinggi secara

sederhana menjadi bagian dari jumlah komponen-komponen yang lebih rendah tingkatannya yang menjadi liputannya. Dalam sistem pemerintahan, bentuk ini nampak pada asosiasi beberapa negara seperti *European Union* (EU).

Dilihat secara hierarkis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari:

Tabel 1. Sistem pemerintahan di Indonesia

Suprasistem	berupa Pemerintahan Nasional dalam arti luas, yang terdiri dari lembaga tinggi.
Sistem	berupa pemerintahan provinsi
Subsistem	berupa pemerintahan kabupaten/kota.
Sub-subsistem	berupa pemerintahan desa

Sumber : Wasistiono (2013)

Meskipun berposisi sebagai subsistem maupun sub-subsistem, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa pada dasarnya adalah sebuah sistem yang utuh, yang menjalankan proses konversi untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output) dan nilai guna (outcome).

Ada tiga prinsip dasar yang harus dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai sebuah sistem. Pertama, hubungan antara suprasistem, sistem, subsistem, dan sub-subsistem diatu melalui asas yang telah dipahami dan disepakati bersama. Kedua, sistem yang berada pada susunan terendah atau terbawah tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih tinggi. Ketiga, susunan sistem yang lebih tinggi berkewajiban memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah. Prinsip-prinsip diatas jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem.

Berdasarkan hierarki sistem dari Bertalanffy (dalam Wasistiono, 2013: 46), maka pemerintah masuk pada kategori tingkatan yang kedelapan yakni sistem sosio-kultural (*Socio Cultural Systems*). Tingkatan ini lebih tinggi dari sistem manusia yang berada pada tingkatan ketujuh, karena sistem sosio-

kultural merupakan produk interaksi antarmanusia.

Sistem Secara Fungsi

Komponen-komponen sistem jika dilihat secara fungsional (Wasistiono, 2013), meliputi: (a) Masukan (*input*); (b) Proses (*process*); (c) Keluaran (*output*); (d) Nilai guna (*outcome*); (e) Dampak (*impact*); (f) Manfaat (*benefit*); (g) Umpan balik (*feedback*); (h) Umpan ke depan (*feedforward*); (h) Lingkungan (*environment*).

Komponen Sistem Secara Umum

Komponen pertama dalam sebuah sistem adalah masukan (*input*). Komponen input dalam sebuah sistem umumnya berupa 6M yaitu, *Man*, yakni orang yang menjalankan sistem; *Money* yakni berupa anggaran yang diperlukan untuk menggerakkan sistem; *Material* yakni bahan-bahan yang diperlukan untuk menggerakkan sistem; *Machine* yakni alat-alat utama yang digunakan untuk menggerakkan sistem; dan yang terakhir adalah *Minute* yakni waktu yang diperlukan untuk menjalankan sistem, termasuk target waktu untuk mencapai sasaran atau tujuan sistem.

Komponen sistem yang kedua adalah proses (*process*), yakni aktivitas mengubah komponen input menjadi komponen output. Jenis proses bermacam-macam tergantung pada sistemnya. Diantara komponen-komponen sistem yang lainnya, komponen proses adalah yang paling unik, rumit, dan dinamis karena proses hanya akan terjadi sekali dan tidak mungkin terulang.

Komponen sistem yang ketiga adalah keluaran (*output*), yakni produk yang dihasilkan dari proses. Dalam dunia usaha, komponen output disejajarkan dengan produk, sehingga yang diukur adalah produktivitas. Sedangkan pada manajemen, output menekankan pada nilai yang pertama yakni efektivitas, yakni perbandingan terbaik antara realisasi dan target.

Komponen sistem yang keempat adalah nilai guna (*outcome*) berupa nilai manfaat dari keluaran sebuah sistem bagi sistem lainnya. Wujudnya dapat berupa kualitas dari keluaran. Komponen sistem yang kelima adalah dampak (*impact*) berupa dampak langsung maupun

tidak langsung, baik positif maupun negatif dari bekerjanya sebuah sistem. Agar sebuah sistem dapat dinyatakan bekerja dengan baik, maka besaran dan arah dampak harus dapat diperhitungkan atau diproyeksikan.

Komponen sistem yang keenam adalah komponen manfaat (*benefit*) dari sistem berupa nilai tambah (*added value*) langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem. Manfaat yang diharapkan adalah sesuai dengan tujuan dibentuknya sistem yang bersangkutan. Komponen ketujuh dari sistem adalah umpan balik (*feedback*) yang arahnya lebih kepada internal sistem. Umpan balik merupakan sebuah mekanisme memberikan masukan balik bagi setiap komponen sistem, sehingga keseimbangan dan eksistensi sistem dapat terjaga.

Komponen kedelapan adalah komponen umpan ke depan (*feedforward*) dari sistem berupa masukan dari sistem yang lebih kecil dan lebih rendah kepada sistem yang lebih besar dan lebih tinggi dari susunannya dan yang terakhir adalah komponen lingkungan (*environment*) berupa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem.

METODE PENELITIAN

Artikel Kajian ini menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1999). Selain itu, studi kepustakaan juga dapat dilakukan dengan memelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).

Dengan kata lain segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari bukubuku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang penelitian dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Sistem Dalam Pemerintahan

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. (Azam, Wijaya and Mendra 2012)

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. (Azam, Wijaya and Mendra 2012)

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. (Azam, Wijaya and Mendra 2012)

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministerial. (Azam, Wijaya and Mendra 2012)

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan

masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. (Azam, Wijaya and Mendra 2012)

Komponen Sistem Pemerintahan

Dilihat secara fungsional, sistem pemerintahan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: (a) Masukan (*Input*) berupa : orang, uang, barang, peraturan perundang - undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dan lain sebagainya; (b) Proses (*process*) berupa : pembuatan kebijakan, pembuatan perijinan, pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya; (c) Keluaran (*Output*) berupa : barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, perijinan, layanan administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dan lain sebagainya; (d) Nilai guna (*Outcome*) berupa nilai manfaat berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang -barang publik bagi kepentingan masyarakat luas, yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat; (e) Dampak (*Impact*) berupa : dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barang-barang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb; (f) Manfaat (*Benefit*) berupa : keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan dlsb; (g) Umpan balik (*Feedback*) berupa : umpan balik pada internal sistem

berupa kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb; (h) Umpan ke depan (*Feedforward*) berupa : umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke atas mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. (i) Lingkungan (*Environment*) berupa : lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan.

Sebuah sistem mempunyai batas yang dinamakan "*boundary of system*". Batas ini memisahkan antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Dalam sistem pemerintahan, batas sebuah sistem pemerintahan dapat bersifat maya (abstrak) maupun nyata. Batas nyatanya berupa wilayah teritorial dan batas-batasnya, perkantoran, perangkat pemerintahan, dan lain sebagainya. Sedangkan, pada sistem sebagai sebuah model berpikir, maka batas sistemnya bersifat maya (batas maya/abstrak). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah adalah sebuah sistem terbuka, untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintah dapat digunakan teori sistem.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sebagai sebuah sistem harus memiliki suatu sistem keseimbangan yang dinamis, agar sistemnya dapat menjaga eksistensinya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap seimbang dan dinamis, perlu dibuat mekanisme umpan balik dan umpan kedepan yang terbuka dan objektif.

Sistem pemerintahan mempunyai tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Komponen sistem pemerintahan, meliputi: (a) Masukan (*input*); (b) Proses (*process*); (c) Keluaran (*output*); (d) Nilai guna (*outcome*); (e) Dampak (*impact*); (f) Manfaat (*benefit*); (g)

Umpan balik (*feedback*); (h) Umpan ke depan (*feedforward*); (h) Lingkungan (*environment*).

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang mendalam terkait pemerintahan sebagai sebuah sistem kekuasaan, karena kekuasaan merupakan poros utama dari terselenggaranya sebuah sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *Jispo*, 7(1), 91. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1739>
- [2] Hasibuan, A. S. (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 33–47. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.916>
- [3] Meadows. (2009). Thinking in systems: a primer. *Choice Reviews Online*, 46(11), 46-6156-46–6156. <https://doi.org/10.5860/choice.46-6156>
- [4] Wasistiono, S. (2013). *Pengantar ekologi pemerintahan*. IPDN Press. [//library.unej.ac.id/index.php?p=show_detail&id=190152](http://library.unej.ac.id/index.php?p=show_detail&id=190152)
- [5] Djodjodhardjo, Harijono. (1984). *Pengantar Sistem Komputer*, Bandung: Erlangga
- [6] Fitzgerald, Jerry. FitzGerald, Ardra F. and Stalling Jr, Warren D. (1981) *Fundamentals Of System Analysis*, Edisi kedua, John Willey & Sons, New York.
- [7] Sidharta, Lani. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo
- [8] Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. (2012). *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- [9] Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi. Aksara
- [10] Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu